

Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Straregik dalam Pendidikan

Acep Wildan Mubarak¹, Alfiyatun², Desi Sri Sulistia³, Ina Nurwahidah⁴

¹STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: acepwildan@stitnualfarabi.ac.id.

²STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: alfiyatun@stitnualfarabi.ac.id

³STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: desisri@stitnualfarabi.ac.id

⁴STIT NU Al-Farabi Pangandaran, e-mail: inanurwahidah@stitnualfarabi.ac.id

ABSTRACT

In education management, there are two regulatory mechanisms, namely centralized and decentralized systems. In a centralized system, everything related to the administration of education is strictly regulated by the central government. Meanwhile, in a decentralized system, regulatory authority is handed over to local governments. The two systems in practice do not apply in extremes, but in the form of a continuum; with the division of tasks and authority between the central government and regional (local) governments. This also applies to education management in Indonesia, as explained in the Elucidation of the 1989 UUSPN that national education is regulated centrally (centralization), but the implementation of educational units and activities is carried out decentralized. This is quite reasonable because each has advantages and disadvantages so that in order to obtain maximum benefits and reduce negative aspects, the management of education combines a centralized and decentralized system.

Keywords : Centralization, Islamic Education, Strategic Management

ABSTRAK

Dalam manajemen pendidikan dikenal dua mekanisme pengaturan, yaitu sistem sentralisasi dan desentralisasi. Dalam sistem sentralisasi, segala sesuatu yang berkenaan dengan penyelenggaraan pendidikan diatur secara ketat oleh pemerintah pusat. Sementara dalam sistem desentralisasi, wewenang pengaturan tersebut diserahkan kepada pemerintah daerah. Kedua sistem tersebut dalam prakteknya tidak berlaku secara ekstrem, tetapi dalam bentuk kontinum; dengan pembagian tugas dan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah (lokal). Hal ini juga berlaku dalam manajemen pendidikan di Indonesia, sebagaimana dijelaskan dalam Penjelasan UUSPN 1989 bahwa pendidikan nasional diatur secara terpusat (sentralisasi), namun penyelenggaraan satuan dan kegiatan pendidikan dilaksanakan secara tidak terpusat (desentralisasi). Hal tersebut cukup beralasan karena masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan sehingga untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya dan mengurangi segi-segi negatif, pengelolaan pendidikan tersebut memadukan sistem sentralisasi dan desentralisasi.

Kata Kunci : Sentralisasi, Pendidikan Islam, Manajemen Strategik

Corresponding Author : Alfiyatun, STIT NU Al-Farabi Pagandaran, Jl. Raya Cigugur KM. 3, Kompleks Pesantren Babakan Jamanis, Kel. Karang Benda, Kec. Parigi, Kab. Pangandaran, e-mail: alfiyatun@stitnualfarabi.ac.id

PENDAHULUAN

Kemajuan peradaban yang dicapai umat manusia dewasa ini tidak terlepas dari peran-peran pendidikan. Kemajuan ilmu dan teknologi yang dicapai bangsa-bangsa di berbagai belahan bumi merupakan akses produk suatu pendidikan, sekalipun diketahui bahwa kemajuan yang dicapai dunia pendidikan selalu di bawah kemajuan yang dicapai dunia industri yang memakai produk lembaga pendidikan. Kewajiban untuk menuntut ilmu merupakan perintah dan ajaran Islam.

Segala macam ilmu yang bermanfaat bagi dirinya serta semua umat. IPTEK juga merupakan hal penting untuk dipelajari karena dengan cara ini umat Islam dapat memperoleh kemajuan material untuk menjalankan fungsinya sebagai khalifah Allah di muka bumi. Islam menetapkan penguasaan sains sebagai fardlu kifayah, yaitu ilmu-ilmu yang sangat diperlukan umat, seperti kedokteran, kimia, fisika, industri penerbangan, biologi, teknik, dan lain sebagainya. Pendidikan Islam merupakan bentuk upaya yang terstruktur untuk membentuk manusia yang berkarakter sesuai dengan konsekuensinya sebagai seorang muslim.

Penguasaan ilmu-ilmu teknik dan praktis serta latihan-latihan keterampilan dan keahlian juga merupakan tujuan pendidikan yang harus dimiliki umat Islam dalam melaksanakan tugasnya sebagai khalifah Allah SWT. Sebagaimana penguasaan IPTEK, rekayasa industri, pertanian, penerbangan, pertukangan, dan lainnya juga sangat diperlukan oleh umat manusia. Lembaga pendidikan semestinya dapat menghasilkan calon-calon penerus yang tinggi secara sumber daya manusianya. Oleh karena itu, sistem pendidikan yang ada harus memadukan beberapa unsur pembentuk pendidikan yang unggul.

Dalam hal ini, ada tiga hal penting yang harus kita perhatikan dengan baik, yaitu: 1) Kerjasama yang terpadu antara sekolah, masyarakat, dan keluarga; 2) Kurikulum yang terstruktur dan terprogram mulai dari tingkat TK hingga Perguruan Tinggi; dan 3) Orientasi pendidikan ditujukan pada kepribadian Islam dan penguasaan ilmu pengetahuan yang bermanfaat bagi umat. Ketiga hal tersebut merupakan goal yang berorientasi pada pembentukan tsaqâfah Islam, kepribadian Islam, dan penguasaan terhadap ilmu pengetahuan. Bagi semua kaum muslimin, sistem pendidikan yang sekarang ini tentunya masih memerlukan perbaikan dan semestinya memperbaharui sistem yang ada untuk kebaikan bersama. Lembaga pendidikan perlu berusaha terus untuk menghasilkan generasi berkepribadian Islam yang mampu mewujudkan kemakmuran dan kemuliaan peradaban bagi umat manusia di seluruh dunia.

Adapun tujuan yang ingin di capai dari penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana Kebijakan Sentralisasi dan Manajemen Strategik yang terdapat di dalam Pendidikan.

Dalam sebuah penelitian pastinya terdapat manfaat di dalam nya, dan adapun manfaat dari penelentian ini yaitu untuk mendapatkan hasil yang bisa direlevansikan dengan penelitian yang sudah ada, sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan kebijakan sentralisasi dan manajemen strategik dalam pendidikan.

METODE PENELITIAN

Metode Penelitian dalam pembahasan ini adalah penelitian kepustakaan (*library research*) dengan mengkaji buku-buku, dan naskah yang bersumber dari khazanah kepustakaan yang relevan dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Sumber data yang digunakan terbagi menjadi dua bentuk primer dan sekunder. Data primer adalah buku dan jurnal yang dijadikan pegangan utama berupa kajian mengenai kecerdasan spiritual. Sedangkan data sekunder adalah buku-buku yang masih dianggap relevan dengan kajian penelitian. Kriteria data pada penelitian ini adalah data yang pasti. Data yang pasti

adalah data yang sebenarnya terjadi sebagaimana adanya, bukan data yang sekedar terlihat, terucap, tetapi data yang mengandung makna di balik yang terlihat dan terucap tersebut.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Pengertian Sentralisasi Pendidikan

Sentralisasi adalah seluruh wewenang terpusat pada pemerintah pusat. Daerah tinggal menunggu instruksi dari pusat untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan yang telah digariskan menurut undang-undang. Sentralisasi banyak digunakan pemerintah sebelum otonomi daerah. Kelemahan sistem sentralisasi adalah sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu hal menjadi lebih lama.

Dalam pemberlakuan kebijakan otonomi yang seluas-luasnya dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, otonomi daerah merupakan distribusi kekuasaan secara vertikal. Distribusi kekuasaan dari pemerintah pusat ke daerah, termasuk kekuasaan dalam bidang pendidikan. Dalam pelaksanaan otonomi daerah di bidang pendidikan tampak masih menghadapi berbagai masalah, diantaranya tampak pada kebijakan pendidikan yang tidak sejalan dengan prinsip otonomi daerah dan kurangnya koordinasi dan sinkronisasi. Kondisi yang demikian dapat menghadirkan beberapa hal, seperti: kesulitan pemerintah pusat untuk mengendalikan pendidikan di daerah; daerah tidak dapat mengembangkan pendidikan yang sesuai dengan potensinya. Apabila hal ini dibiarkan, berbagai akibat yang tidak diinginkan bisa muncul, misalnya, kembali pada kebijakan pendidikan yang sentralistis, tetapi sangat dimungkinkan juga daerah membuat kebijakan pendidikan yang dianggapnya paling tepat meskipun sebenarnya bersebrangan dengan kebijakan pusat. Apabila kebijakan pendidikan dalam konteks otonomi daerah tidak dilakukan upaya sinkronisasi dan koordinasi dengan baik, tidak mustahil otonomi tersebut mengarah pada disintegrasi bangsa. Kondisi demikian diperlukannya koordinasi serta sinkronisasi kebijakan pendidikan di daerah dan pusat.

Secara teoritis, sentralisasi mempunyai keunggulan antara lain: 1) organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengambilan keputusan lebih mudah; 2) perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut; 3) peningkatan resource sharing dan sinergi, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat; 4) pengurangan fasilitas lain, suatu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda; 5) perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya unity of command; 6) pemusatan expertise, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinandapat memberi wewenang.

Disamping itu sentralisasi mempunyai kelemahan antara lain: 1) kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut; 2) anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalutinggi; 3) penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang saja; 4) peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyak masalah pada level unit organisasi yang di bawah; dan 5) perspektif luas, tetapi kurang mendalam pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar kan perspektiforganisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

B. Kelebihan dan Keunggulan Sistem Sentralisasi

1. Keunggulan Sistem Sentralisasi

Dalam suatu system tentu di dalam nya memiliki keunggulan tersendiri, Beberapa keunggulan yang di terdapat di dalam system Sentralisasi antara lain:

- a. organisasi menjadi lebih ramping dan efisien. Seluruh aktivitas organisasi terpusat sehingga pengembalian keputusan lebih mudah;
- b. perencanaan dan pengembangan organisasi lebih terintegrasi. Tidak perlu jenjang koordinasi yang terlalu jauh antara unit pengambilan keputusan dan yang akan melaksanakan atau terpengaruh oleh pengambilan keputusan tersebut;
- c. peningkatan resource sharing dan sinergi, sumber daya dapat dikelola secara lebih efisien karena dilakukan secara terpusat;
- d. pengurangan fasilitas lain, suatu aset dapat dipergunakan secara bersama-sama tanpa harus menyediakan aset yang sama untuk pekerjaan yang berbeda-beda;
- e. perbaikan koordinasi menjadi lebih mudah karena adanya *unity of command*;
- f. pemusatan expertise, keahlian dari anggota organisasi dapat dimanfaatkan secara maksimal karena pimpinan dapat memberi wewenang.

2. Kelemahan Sistem Sentralisasi

Kelemahan sistem sentralisasi adalah sebuah kebijakan dan keputusan pemerintah daerah dihasilkan oleh orang-orang yang berada di pemerintah pusat sehingga waktu untuk memutuskan suatu menjadi lebih lama Dalam pemberlakuan kebijakan.

- a. kemungkinan penurunan kecepatan pengambilan keputusan dan kualitas keputusan. Pengambilan keputusan dengan pendekatan sentralisasi seringkali tidak mempertimbangkan faktor-faktor yang sekiranya berpengaruh terhadap pengambilan keputusan tersebut;
- b. anggota organisasi sulit mengembangkan potensi dirinya karena tidak ada wahana dan dominasi pimpinan yang terlalu tinggi;
- c. penurunan kecepatan untuk merespon perubahan lingkungan. Organisasi sangat tergantung pada daya respon sekelompok orang saja;
- d. peningkatan kompleksitas pengelolaan. Pengelolaan organisasi akan semakin rumit karena banyak masalah pada level unit organisasi yang di bawah;
- e. perspektif luas, tetapi kurang mendalam pimpinan organisasi akan mengambil keputusan berdasar kan perspektif organisasi secara keseluruhan tapi tidak atau jarang mempertimbangkan implementasinya akan seperti apa.

C. Pengertian Strategik Pendidikan

1. Konsep Manajemen Strategik

Menurut Richard Vancil yang ditulis oleh Karhi Nisjar Winardi mengemukakan bahwa manajemen strategik adalah perumusan konsep strategi sebuah organisasi, atau sub unit sebuah organisasi lebih besar, yaitu sebuah konseptualisasi dinyatakan atau diimplikasikan oleh pemimpin organisasi yang bersangkutan berupa:

- a. Sasaran-sasaran jangka panjang atau tujuan-tujuan organisasi tersebut.
- b. Kendala-kendala luas dan kebijakan-kebijakan, yang atau di tetapkan sendiri oleh sang pemimpin, atau yang diterimanya dari pihak atasannya, yang membatasi scope aktivitas-aktivitas organisasi yang bersangkutan.

- c. Kelompok rencana-rencana dan tujuan-tujuan jangka pendek dan telah ditetapkan dengan ekspektasi akan diberikannya sumbangsih mereka dalam hal mencapai sasaran-sasaran organisasi tersebut.

Manajemen strategik menurut Blocher dan Lin adalah “*the development of a sustainable competitive position in wich the firm's competitive provides continued success*”. Manajemen strategik jika dalam dunia bisnis dimanfaatkan untuk memprediksi kecenderungan pasar dan peluang-peluang memperoleh keunggulan bersaing. Sementara itu, dunia pendidikan menggunakan konsep strategik untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam pencapaian tujuan pendidikan.

Manajemen Strategik menurut Flavel dan Williams, adalah sebagai keseluruhan sistem manajemen, dimana didalamnya terkandung formulasi, implementasi dan evaluasi guna mencapai hasil yang realistis dan obyektif.

Ansorf berpendapat bahwa, manajemen strategik ialah suatu pendekatan yang sistematis bagi suatu tanggung jawab manajemen, mengondisikan organisasi ke posisi yang dipastikan mencapai tujuan melalui cara yang akan meyakinkan keberhasilan yang berkelanjutan dan membuat sekolah menjamin atau mengamankan formulasi yang belum terfikirkan sebelumnya. Pendekatan sistematis untuk melakukan perubahan menjadi hal penting dalam manajemen strategik, dan melalui pendekatan manajemen strategik harus dipastikan bahwa tujuan akan dicapai. Oleh karena itu para pemimpin sekolah diharapkan menggunakan pendekatan yang sistematis dalam menyusun strategi program sekolah.

Pelaksanaan manajemen strategik akan membuat acuan yang jelas dengan berbagai langkah-langkah dan analisa mengenai perkembangan lembaga. Dalam hal ini peranan kepala sekolah/madrasah menjadi hal yang sangat dominan dalam melakukan kontrol dan gagasannya. Maka peneliti juga akan beruaha menggali implementasi manajemen strategik yang digunakan mulai dari kepala lembaga pendidikan yang dijadikan subyek penelitiannya.

Ketentuan untuk mempertimbangkan apakah sebuah organisasi itu dikelola secara baik atau tidak akan banyak dipengaruhi oleh perimbangan yang bersifat subyektif dalam melakukan penilaian terhadap perencanaan serta pelaksanaan strategi. Sebuah organisasi jika semakin baik dalam melakukan perencanaan dan semakin sedikit kecil tingkat kesalahan yang terjadi dalam implementasinya, maka akan semakin besar kesempatan bagi organisasi tersebut mencapai kinerja yang optimal.

Pengertian yang menyeluruh dari berbagai pemaknaan manajemen strategik yang telah dijelaskan sebelumnya dapat diambil kesimpulan sebagaimana berikut:

- a. Manajemen strategik pada intinya adalah untuk memilih alternative strategi yang terbaik bagi organisasi atau perusahaan dalam segala hal untuk mendukung gerak usaha lembaga atau organisasi.
- b. Perusahaan atau lembaga harus melaksanakan manajemen strategik secara terus menerus dan fleksibel sesuai dengan ketentuan kondisi di lapangan.

2. Prinsip Manajemen Strategik

Pengertian manajemen strategik yang telah dipaparkan pada sub bab diatas dapat dibentuk kedalam bagian prinsip mengenai manajemen strategik. Menurut akdon, pada dasarnya manajemen strategik mengandung dua hal penting, yaitu:

- a. Manajemen strategik mengandung tiga unsur proses manajemen yaitu, pembuatan strategi, penerapan strategi, dan evaluasi atau kontrol terhadap strategi.
- b. Manajemen strategik menfokuskan pada penyatuan atau penggabungan aspek-aspek pemasaran, riset dan pengembangan, keuangan dan operasional dalam sebuah bisnis.

Prinsip lain dikemukakan oleh Nawawi, bahwa manajemen strategik merupakan perencanaan yang bersekala besar atau disebut perencanaan strategik yang berorientasi terhadap jangkauan jauh kedepan (visi) kemudian ditetapkan menjadi manajemen puncak atau keputusan yang bersifat mendasar, sehingga memungkinkan organisasi berinteraksi secara efektif (visi), untuk usaha meraih jasa atau output yang berkualitas dengan diarahkan pada optimalisasi tujuan yang disebut tujuan strategik dan berbagai tujuan sasaran organisasi.

Definisi diatas menjelaskan bahwa manajemen strategik adalah kesatuan koponen yang membe ntuk sistem, sehingga didalamnya saling mempengaruhi untuk menciptakan irama kearah tujuan yang ingin dicapai. Berbagai komponen tersebut terdiri dari visi, misi, tujuan strategik, serta yang paling utama adalah langkah straegi organisasi. Sedangkan elemen yang kedua merupakan perencanaan yang bersifat operasional yaitu berupa berbagai fungsi pengorganisasian, kebijakan yang bersifat insidental, komunikasi internal dan networking eksternal, fungsi control serta evaluasi umpan balik.

3. Langkah-langkah Manajemen Strategik

Karakteristik *pertama* yang ada pada proses manajemen strategik adalah adanya kesatuan (*unity*) dan proses yang runtut. Jadi, sebenarnya tahapan dalam manajemen strategik yaitu dimulai dari pengembangan misi organisasi, menetapkan tujuan, menyusun strategi, implementasi strategi, dan akhirnya evaluasi kinerja adalah merupakan satu kesatuan yang sulit untuk dipisahkan.

Kedua, tahapan dalam proses manajemen strategik tidak terjadi dalam sisi yang terpisah dari fungsi manajemen secara umum. Hal ini disebabkan implementasi strategi mencakup setiap aspek dalam fungsi manajemen. Selain itu kerumitan dalam implementasi strategi terjadi karena dalam pelaksanaannya dapat dimulai dari berbagai sudut dalam organisasi.

Ketiga, manajemen strategik menghendaki adanya fleksibilitas manajer dalam mengalokasikan waktunya. Karena perubahan situasi yang ada terjadi tidak dalam urutan waktu yang teratur dan dapat diprakirakan sebelumnya.

Keempat, penyusunan manajemen strategik yang ideal adalah banyak memakan waktu atau "*time-consuming*". Hal ini terjadi karena untuk mendapatkan hasil yang sempurna (*perfect*) dari strategi yang ada dibutuhkan strategi pendukung yang terbaik dalam setiap proses yang terjadi. Oleh karena itu sebenarnya manajemen strategik sebagian besar adalah mengendalikan apa yang sedang terjadi, bukan mengembangkan dan memulai perubahan dalam strategi. Itu sebabnya mengapa keterampilan manajemen strategik yang paling berharga adalah lebih pada pemahaman tentang kapan sesuatu itu harus dilakukan dibanding dengan tindakan perumusan strategi perubahan itu sendiri.

4. Manfaat Manajemen Strategik

Manajemen Strategik digunakan sebagai instrumen untuk mengantisipasi perubahan lingkungan internal dan eksternal, sekaligus sebagai langkah sitematis untuk

membangun suatu lembaga agar mencapai tujuan yang ingin dicapai dengan efektif, efisien dan produktif. Penerapan Manajemen Strategik dalam suatu organisasi/ perusahaan diharapkan akan membawa manfaat-manfaat sebagai berikut:

- a. Memberikan arah jangka panjang yang akan dituju.
- b. Membantu organisasi beradaptasi pada perubahan-perubahan yang terjadi.
- c. Membuat suatu organisasi menjadi lebih efektif.
- d. Mengidentifikasi keunggulan komparatif suatu organisasi dalam lingkungan yang semakin beresiko.
- e. Aktivitas pembuatan strategi akan mempertinggi kemampuan perusahaan (organisasi) untuk mencegah munculnya masalah dimasa datang.
- f. Keterlibatan karyawan dalam pembuatan strategi akan lebih memotivasi mereka pada tahap pelaksanaannya.
- g. Aktivitas yang tumpang tindih akan dikurangi.
- h. Keengganan untuk berubah dari karyawan lama dapat dikurangi.

Manajemen strategik akan lebih mempunyai manfaat jika terdapat kesinambungan antara strategi puncak dengan strategi operasional. Perlu adanya penyatuan misi dan visi disetiap elemen lembaga tersebut, disisi lain peran pemimpin dan manajer menjadi sangat penting dalam menganalisa kebutuhan dan perkiraan kedepan mengenai tujuan lembaga.

PENUTUP

Sentralisasi pendidikan belum berhasil dalam mengoptimalkan peran pendidikan sebagai kekuatan moral bangsa ini. Disamping itu, slogan dunia tentang hak pendidikan bahwa education for all masih ada dalam tatanan konsep. Proses seperti ini telah menghilangkan potensi masyarakat untuk melahirkan masa yang kritis terhadap situasi pendidikan. Desentralisasi pendidikan Islam atau otonomi pendidikan merupakan salah satu model pengelolaan pendidikan dengan memberikan suatu pendelegasian kewenangan tertentu di tingkat sekolah untuk membuat keputusan-keputusan yang berkenaan dengan upaya untuk memperbaiki kualitas pendidikan serta sumber daya manusia termasuk profesionalitas guru PAI pada setiap sekolah.

Perubahan paradigma sentralisasi ke desentralisasi membutuhkan transparansi, kepastian hukum, akuntabilitas, dan partisipasi sebagai aspek penting dalam menciptakan masyarakat yang demokratis. Partisipasi yang menjadi aset penting bagi pemberdayaan masyarakat hanya bersipat semu. Hal ini memberikan hambatan-hambatan atas sejumlah kebijakan atau program yang di desain tidak bisa berjalan secara optimal. Kebijakan desentralisasi pendidikan yang bertujuan untuk pemerataan dan kesempatan pendidikan, peningkatan mutu pendidikan gagal jika tidak didukung oleh partisipasi masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Calam, A., Marhamah, A., & Nazaruddin, I. (2020). Reformulasi Visi, Misi dan Tujuan Bafadal Ibrahim, 2012, Manajemen Peningkatan Mutu Sekolah Dasar: Dari Sentralisasi Menuju Desentralisasi, Jakarta: Bumi Aksara
- Chan, Sam dan Tuti T. Sam, (2010). Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah, Jakarta: Rajawali Pers.
- Dwiningrum, Siti Irene A.D. (2012). Desentralisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pendidikan. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- H A R. Tilaar, (2000), Paradigma Baru Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta
- Hadiyanto, Mencari Sosok Desentralisasi Manajemen Pendidikan di Indonesia, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Hasbullah, (2006). Otonomi Pendidikan: Kebijakan Otonomi daerah dan Implikasinya terhadap Penyelenggaraan Pendidikan, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- Masrokan Muthohar, Prim, (2013). Manajemen Mutu Sekolah, Strategi Peningkatan Mutu dan Daya Saing Lembaga Pendidikan Islam, Yogyakarta: Ar Ruzz Media.
- MaCandrews, Colin dan Ichlasul Amal. (1993). Hubungan Pusat Daerah dalam Pembangunan. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada
- Pomalingo, Nelson, (2006), Paradigma Pendidikan dalam Pembangunan Daerah, (Ed. M. Isnaeni dan Hartono Hadjarati), Jakarta: Pustaka Indonesia Press
- Sujanto, Bedjo, (2007). Manajemen Pendidikan Berbasis Sekolah: Model Pengelolaan Sekolah di Era Otonomi Daerah, Jakarta: Sagung Seto.
- Tjokroamidjojo, Bintoro. 1990. Pengantar Administrasi Pembangunan, Jakarta: LP3ES
- Wibawa, Basuki, (2017). Manajemen Pendidikan: Teknologi Kejuruan dan Vokasi, Jakarta: Bumi Aksara Group
- Tilaar, H.A.R, Membenahi Pendidikan Nasional, Jakarta: Rineka Cipta, 2009. Kekuasaan dan Pendidikan: Suatu Tinjauan dari Perspektif Studi Kultural, Magelang: Indonesiatara, 2003.